

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan didirikan untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan dan menarik perhatian para *Stakeholder*. Aspek keuangan merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam perkembangan bisnis di semua perusahaan (Rahayu, 2019). Oleh karena itu, manajemen perusahaan harus memberikan informasi tambahan untuk menaikkan minat para *Stakeholder* (Sitorus, 2020) dalam (Tinggi & Ekonomi, 2024). Keadaan keuangan tidak memungkinkan untuk mempertahankan nilai perusahaan. Hal ini disebabkan oleh tuntutan dari para stakeholder perusahaan yang ingin mengetahui tentang kinerja keuangan dan non-keuangan serta hasil lingkungan dan sosial (Andika & Anisah, 2022). Namun, banyak perusahaan mengabaikan dampak lingkungan dan sosial karena pekerjaan mereka.

Bentuk transparansi lain yang perlu mendapat perhatian ialah kepentingan perusahaan terhadap ekonomi, masyarakat, sosial dan lingkungan. Menurut Teori Legitimasi, perusahaan bertanggung jawab terhadap masalah lingkungan dan masyarakat (Eliyana & Subakir, 2020) dalam (Tinggi & Ekonomi, 2024). Perusahaan yang beroperasi memiliki kewajiban yang tidak hanya harus memprioritaskan pertumbuhan laba tetapi juga memiliki tingkat pengelolaan sosial dan lingkungan dalam operasi perusahaan yang mempertimbangkan perspektif di masa depan.

Bagaimana suatu perusahaan mampu memenuhi kewajibannya digambarkan oleh struktur modalnya atau biasa disebut *leverage*. Penggunaan *leverage* dapat menimbulkan biaya dan risiko bagi perusahaan. Tingkat utang yang tinggi dapat meningkatkan kecenderungan suatu perusahaan untuk melanggar perjanjian kredit, yang berarti perusahaan harus melaporkan laba yang lebih tinggi. Rasio laba yang tinggi akan menunjukkan kuatnya posisi keuangan perusahaan sehingga dapat meyakinkan pihak-pihak yang berkepentingan pinjaman dengan konsesi (prastyawan & astuti, 2023). Menurut penelitian Wulandari dkk. , (2021), struktur modal tidak berpengaruh terhadap pengungkapan keberlanjutan. Sedangkan menurut penelitian Prastyawan & Astuti (2023) struktur modal berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan.

Laporan yang diterbitkan perusahaan menunjukkan tanggung jawab perusahaan kepada pemangku kepentingan. Dengan meningkatkan struktur modal, secara tidak langsung perusahaan mempunyai lebih banyak pemangku kepentingan. Sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap investasi yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*) perusahaan, terdapat kebutuhan yang semakin besar terhadap informasi yang lebih luas untuk dipublikasikan oleh perusahaan. Menurut penelitian Wulandari dkk. (2021) struktur modal tidak berpengaruh mengenai publikasi laporan pembangunan berkelanjutan. Sedangkan menurut penelitian Prastyawan & Astuti (2023) struktur modal berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan.

Konsep tentang perusahaan yang harus bertanggung jawab tidak hanya terkait keuangan tergambar dalam konsep *Triple Bottom Line*. *Triple Bottom Line* muncul karena adanya tuntutan masyarakat terhadap peran perusahaan di

lingkungan sekitar (Heriyani, DP, & Silfi, 2019). Konsep *Triple Bottom Line* mencakup tiga ukuran kinerja perusahaan sekaligus, yaitu kinerja ekonomi (profit), tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat (*people*), dan sosial (planet). Hal ini karena kondisi keuangan saja belum cukup untuk menilai pertumbuhan perusahaan dalam jangka panjang dan tidak menjamin pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan. Perusahaan semakin menyadari bahwa kegiatan operasionalnya dapat menimbulkan masalah bagi masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan dimana kegiatan produksi beroperasi.

Pemerintah Indonesia telah menyusun regulasi tentang pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 74 ayat 1, yang menyampaikan bahwa, perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dengan demikian, pemerintah Indonesia telah mengamanatkan kewajiban bagi perusahaan untuk bertanggung jawab secara sosial dan terhadap lingkungan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menerbitkan regulasi terkait tanggung jawab sosial dan lingkungan, menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan untuk Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik. Oleh karena itu, undang-undang dan regulasi ini seharusnya menjadi faktor yang mendorong perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta tanggung jawab yang lainnya seperti dampak ekonomi, keterlibatan pemangku kepentingan, keselamatan dan kesehatan kerja,

dan keberagaman dan kesetaraan yang kemudian diungkapkan dalam *sustainability report*.

Menurut *Global Reporting Initiative* (2019) *sustainability report* adalah laporan tentang dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial yang disebabkan oleh kegiatan sehari-hari yang diterbitkan oleh perusahaan atau organisasi. *Sustainability report* dianggap krusial karena mampu menunjukkan transparansi kepada *stakeholder* yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan (Wibowo, 2020). Menurut Mujiani & Nurfitri (2020), meskipun perusahaan tidak diwajibkan untuk mengungkapkan laporan keberlanjutan, tekanan untuk menyediakan informasi yang jelas, akuntabel, serta menerapkan praktik tata kelola perusahaan yang lebih baik menuntut perusahaan untuk secara sukarela mengungkapkan aspek-aspek seperti aktivitas sosial dan lingkungan. Panduan dalam *Sustainability Report Global Reporting Initiative Standard* terbagi menjadi 2 standar pelaporan, yaitu: standar universal dan standar topik spesifik. Standar dalam GRI terbagi menjadi 4 seri. Seri 100 berkaitan tentang standar universal, yang terdiri dari 3 standar universal, yaitu: GRI 101(Landasan), GRI 102 (Pengungkapan Umum), dan GRI 103 (Pendekatan Manajemen). Sedangkan pada seri 200,300,400 berkaitan dengan standar topik spesifik, yang terdiri dari topik ekonomi, topik lingkungan, dan topik sosial (Fajrianto & Mulawarman, 2020). Ada 148 item yang terbagi dalam kategori tersebut. Metode perhitungan indeks SRDI adalah jumlah item yang diungkapkan dibagi dengan jumlah item yang diharapkan menurut GRI *Standars* yaitu 148 item (Meutia & Titik, 2019).

Pengungkapan *sustainability report* telah muncul sebagai wujud tanggung jawab perusahaan yang memperhitungkan dimensi ekonomi, sosial, dan

lingkungan. Namun, pada kenyataannya, masih banyak perusahaan di Indonesia yang belum sepenuhnya melaporkan laporan keberlanjutan (*sustainability report*). Salah satunya pada sektor energi. Perusahaan sektor energi merupakan perusahaan yang banyak menyumbangkan pendapatan pada negara, tetapi dengan banyaknya perusahaan energi menjadi hal yang mungkin akan merusak lingkungan alam sekitarnya (Purwanti & Lestari, 2021). Perusahaan sektor energi adalah perusahaan yang memiliki dampak lingkungan yang besar, termasuk masalah seperti peningkatan emisi gas rumah kaca, penggunaan sumber daya alam yang berlebihan, pengaruh terhadap ekosistem dan keanekaragaman hayati, dan dampak sosial pada masyarakat sekitar (Chiputra, Nugroho, & Setiyawati, 2023). Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro, pembangunan di sektor energi dari penyediaan hingga pemanfaatan berpotensi memberikan dampak negatif terhadap perubahan fungsi lingkungan hidup. Seperti yang terjadi pada pertengahan tahun 2019 terjadi kebocoran salah satu pipa milik Pertamina. Kebocoran tersebut terjadi di sumur YYA-1 area Pertamina Hulu *Energi Offshore North West Java* (PHE ONWJ), yang kemudian menyebar ke pesisir pantai di Kerawang, Jawa Barat kemudian sampai Kepulauan Seribu (Setiawan, 2019). Pada tahun 2021 PT. Aneka Tambang Tbk (ANTAM) mencemari sungai dan pesisir pantai di Halmahera Timur yang mengakibatkan ekosistem mangrove dan laut terancam rusak serta warga kehilangan sumber air bersih (Mongabay.co.id, 2021). Selain itu, PT. Aneka Tambang Tbk juga terlibat kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan di Blok Mandiodo, Sulawesi Tenggara (dpr.go.id, 2022). Melihat banyaknya kasus yang terjadi, mencerminkan bagaimana perusahaan hanya mementingkan peningkatan laba tanpa memperhatikan kondisi lingkungan di

sekitar perusahaan. Maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan tidak memberikan kontribusi bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

Selain kasus-kasus diatas, pengungkapan *sustainability report* pada sektor energi masih sedikit yang sudah memenuhi standar pengungkapan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Republik Indonesia nomor 16/seojk.04/2021 yang menjelaskan tentang bentuk dan isi laporan emiten atau perusahaan publik, yang menjelaskan bahwa *sustainability report* paling sedikit harus memuat informasi sebanyak 63 item, yang jika aturan ini dijabarkan dalam pengungkapan *sustainability report* yang berlandaskan pada standar GRI, maka 63 item tersebut setara dengan 43%. Berikut ini adalah tabel skor SRDI dari perusahaan sektor energi periode 2019-2023:

Tabel 1.1
Pengungkapan Sustainability Report Pada Sektor Energi yang Terdaftar di BEI Tahun 2019-2023

No.	Kode	Jumlah item yang diungkapkan perusahaan dan persentasenya									
		2019		2020		2021		2021		2023	
			%		%	48	32%		%		%
1	ADMR	-	-	-	-	61	41%	57	38%	-	-
2	ADRO	84	57%	45	30%	18	12%	24	16%	24	16%
3	AIMS	33	22%	28	19%	114	77%	29	20%	-	-
4	AKRA	77	52%	35	24%	38	26%	112	76%	67	45%
5	APEX	27	18%	25	17%	24	16%	28	19%	27	18%
6	ARII	24	16%	27	18%	27	25%	38	26%	24	16%
7	ARTI	21	14%	24	18%	36	24%	24	26%	19	13%
8	BBRM	37	25%	39	26%	49	33%	53	36%	30	20%

9	BESS	48	32%	51	34%	41	28%	46	31%	-	-
10	BIPI	53	36%	40	27%	-	-	41	28%	50	34%
11	BOSS	-	-	36	24%	23	15%	-	-	-	-
12	BSML	-	-	-	-	46	31%	-	-	-	-
13	BSSR	37	25%	42	28%	-	-	30	20%	36	24%
14	BULL	-	-	30	20%	99	67%	34	23%	28	19%
15	BUMI	87	59%	84	57%	12	8%	81	55%	65	44%
16	BYAN	21	14%	30	20%	-	-	32	22%	13	9%
17	CANI	-	-	26	18%	30	20%	-	-	-	-
18	CNKO	16	11%	12	8%	-	-	23	15%	20	13%
19	COAL	-	-	-	-	81	55%	29	20%	-	-
20	DEWA	81	55%	84	57%	58	39%	76	51%	70	47%
21	DOID	68	46%	41	28%	37	25%	32	22%	64	43%
22	DSSA	21	14%	58	39%	-	-	21	14%	29	20%
23	DWGL	-	-	-	-	58	39%	-	-	-	-
24	ELSA	64	43%	67	45%	67	45%	30	20%	41	28%
25	ENRG	53	36%	65	44%	37	25%	34	23%	55	37%
26	FIRE	28	19%	32	22%	47	32%	29	20%	26	18%
27	GEMS	21	14%	24	16%	11	7%	110	74%	18	12%
28	GTBO	9	6%	8	5%	-	-	13	9%	8	5%
29	GTSI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	HITS	-	-	-	-	21	14%	-	-	-	-
31	HRUM	51	34%	25	17%	21	14%	27	23%	46	31%
32	IATA	17	11%	12	8%	113	76%	36	24%	17	11%
33	INDY	53	36%	55	37%	49	33%	19	13%	43	31%
34	INPS	40	27%	37	25%	-	-	52	35%	17	11%
35	ITMA	-	-	-	-	75	51%	-	-	43	29%
36	ITMG	54	36%	88	59%	30	20%	82	55%	-	-
37	KKGI	45	30%	30	20%	-	-	30	20%	-	-
38	KOPI	-	-	-	-	117	79%	60	41%	47	32%

39	LEAD	-	-	-	-	28	19%	-	-	42	28%
40	MBAP	18	12%	18	12%	49	33%	26	18%	-	-
41	MBSS	44	30%	40	27%	-	-	50	34%	-	-
42	MCOL	-	-	-	-	48	32%	-	-	26	18%
43	MEDC	50	34%	49	33%	19	13%	52	35%	39	26%
44	MITI	15	10%	15	10%	20	13%	20	13%	-	-
45	MTFN	12	8%	12	8%	34	23%	-	-	48	32%
46	MYOH	29	20%	34	23%	121	82%	32	22%	9	6%
47	PGAS	105	71%	65	44%	-	-	119	81%	11	7%
48	PKPK	-	-	-	-	-	-	-	-	33	22%
49	PSSI	-	-	-	-	110	74%	-	-	100	68%
50	PTBA	80	54%	108	73%	-	-	51	34%	-	-
51	PTIS	-	-	-	-	79	53%	-	-	-	-
52	PTRO	59	40%	101	68%	42	28%	65	44%	99	67%
53	RAJA	36	24%	38	26%	42	28%	28	19%	-	-
54	RIGS	36	24%	38	26%	60	41%	29	20%	58	39%
55	RMKE	-	-	-	-	-	-	63	43%	33	22%
56	RUISS	21	14%	25	17%	31	21%	38	26%	31	21%
57	SGER	-	-	21	14%	32	22%	37	25%	-	-
58	SHIP	-	-	-	-	22	15%	42	28%	25	17%
59	SICO	-	-	-	-	33	22%	34	23%	-	-
60	SMMT	50	34%	31	21%	16	11%	34	23%	-	-
61	SMRU	23	16%	13	9%	45	30%	21	14%	-	-
62	SOCI	29	20%	36	24%	-	-	18	12%	45	30%
63	SUGI	-	-	-	-	31	21%	-	-	19	13%
64	SURE	17	11%	25	17%	19	13%	34	23%	17	11%
65	TAMU	23	16%	27	18%	31	21%	23	16%	-	-
66	TCPI	40	27%	55	37%	32	22%	35	24%	33	22%
67	TEBE	33	22%	37	25%	50	34%	53	36%	25	17%
68	TOBA	48	32%	53	36%	-	-	58	39%	57	39%

69	TPMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	TRAM	-	-	-	-	15	10%	-	-	-	-
71	UNIQ	-	-	18	12%	50	34%	24	16%	-	-
72	WINS	46	31%	35	24%	-	-	52	35%	-	-
73	WOWS	-	-	-	-	34	23%	-	-	-	-
74	ETWA	35	24%	36	24%	29	20%	33	22%	27	18%
75	JSKY	23	16%	26	18%	-	-	-	-	20	14%
76	SEMA	-	-	-	-			37	25%	-	-

Sumber: data diolah oleh penulis tahun 2024

Berdasarkan tabel 1.1, terlihat bahwa hanya beberapa perusahaan sektor energi yang telah memenuhi ketentuan standar pengungkapan *sustainability report* yang berdasarkan pada ketetapan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Adapun berdasarkan data diantaranya yaitu Pada tahun 2019 hanya terdapat 8 perusahaan yang memenuhi standar pengungkapan sedangkan sisanya sebanyak 68 perusahaan belum memenuhi standar pengungkapan. Pada tahun 2020 hanya terdapat 8 perusahaan yang memenuhi standar pengungkapan sedangkan sisanya sebanyak 68 perusahaan belum memenuhi standar pengungkapan. Pada tahun 2021 hanya terdapat 10 perusahaan yang memenuhi standar pengungkapan sedangkan sisanya sebanyak 66 perusahaan belum memenuhi standar pengungkapan. Adapun pada tahun 2022 hanya terdapat 8 perusahaan yang memenuhi standar pengungkapan pada tahun 2023 hanya terdapat 6 perusahaan yang memenuhi standar pengungkapan sedangkan sisanya sebanyak 70 perusahaan belum memenuhi standar pengungkapan. sedangkan sisanya sebanyak 68 perusahaan belum memenuhi standar pengungkapan. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa masih banyak perusahaan sektor energi yang belum memenuhi standar GRI yang disesuaikan dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Republik

Indonesia nomor 16/seojk.04/2021 yaitu 43%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tingkat pengungkapan *sustainability report* pada perusahaan sektor energi masih rendah.

Untuk menguji Implikasi karakteristik perusahaan, struktur modal, *leverage*, terhadap pengungkapan *sustainability report*. Peneliti menggunakan sampel perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI periode 2019-2023. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengusungkan judul penelitian **“Implikasi Ukuran Perusahaan, Struktur Modal, *Leverage* Terhadap Pengungkapan *Sustanaibility Report* Pada Perusahaan Sektor Energi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode tahun 2019-2023**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat di identifikasikan permasalahan yang ada sebagai berikut:

1. Laporan keberlanjutan yang masih bersifat sukarela menyebabkan banyak perusahaan yang masih mengabaikan pengungkapan laporan keberlanjutan.
2. Kurangnya antusias perusahaan dalam memahami pentingnya peran sosial dan lingkungan terhadap daerah sekitar operasional perusahaan.
3. Belum adanya perhatian yang lebih dari pemerintah untuk melakukan imbauan dan sosialisasi kepada perusahaan-perusahaan, serta menetapkan peraturan wajib yang mengatur tentang pengungkapan laporan keberlanjutan perusahaan.
4. Masih banyaknya perusahaan yang masih acuh untuk membuat laporan berkelanjutan (*sustanaibility report*).

5. Belum seluruhnya perusahaan yang sudi untuk mengungkapkan laporan berkelanjutan (*sustanaibility report*).
6. Masih banyaknya perusahaan yang struktur modalnya mengkhawatirkan. Melebihi dari ambang batas aman.
7. Kurangnya kesadaran perusahaan-perusahaan untuk bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan, karena masih banyak perusahaan yang merusak lingkungan sekitar tanpa bertanggung jawab.
8. Banyak perusahaan yang cenderung mementingkan keuntungan untuk perusahaan itu sendiri dengan menggunakan seluruh sumber daya yang ada tanpa memperbaharui sumber daya yang digunakan.
9. Minat perusahaan mempublikasikan *sustanaibility report* masih sedikit, karena pengungkapan *sustanaibility report* ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit.
10. Peningkatan pengungkapan aspek keberlanjutan oleh perusahaan tidak diiringi dengan peningkatan kualitas informasi, menyebabkan laporan keberlanjutan sering dianggap oportunistis, *greenwashing*, dan simbolis.

1.3 Batasan Masalah

Permasalahan yang ada pada identifikasi masalah diatas, tidak akan di bahas secara keseluruhan. Untuk memberikan arahan dan memudahkan dalam penelitian ini, maka penulis memfokuskan menganalisa variabel bebas yaitu Ukuran perusahaan (X1), Struktur Modal (X2), *Leverage* (X3) variabel terikat yaitu Pengungkapan *Sustanaibility Report* (Y) pada perusahaan Sektor Energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan *sustanaibility reporting* di perusahaan Sektor Energi?
2. Apakah strukur modal berpengaruh terhadap pengungkapan *sustanaibility reporting* di perusahaan Sektor Energi?
3. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap pengungkapan *sustanaibility reporting* di perusahaan Sektor Energi?
4. Apakah ukuran perusahaan, Struktur Modal, *leverage*, berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability reporting* di perusahaan Sektor Energi?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *sustanaibility reporting*.
2. Untuk mengetahui apakah struktur modal berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *sustanaibility reporting*.
3. Untuk Mengetahui apakah *leverage* berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *sustanaibility reporting*.
4. Untuk mengetahui ukuran perusahaan, Struktur Modal, dan *leverage* berpengaruh signifikan secara simultan terhadap pengungkapan *sustainability reporting*.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh ukuran perusahaan, struktur modal, *leverage* dan terhadap pengungkapan *sustanaibility report* pada perusahaan manufaktur sektor energy yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023.

2. Bagi Perusahaan

Memberikan masukan berupa saran dan informasi kepada pihak manajemen perusahaan tentang pengaruh ukuran perusahaan, struktur modal dan *leverage* , sehingga untuk kedepanya perusahaan berfikir ulang dalam melakukan pengelolaan perusahaan.

3. Bagi Peniliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan penelitian lebih lanjut terutama tentang ukuran perusahaan, struktur modal, *leverage*.